



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISWANDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 64181

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.567.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 322.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
3. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
6. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 88.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 69.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.412.254.671

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.137.004.671



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.137.004.671

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.